

**EFEKTIVITAS PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MANDIRI PERDESAAN (PNPM-MPd) DALAM MENINGKATKAN
PEREKONOMIAN MASYARAKAT DITINJAU DARI
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi UPK Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)**

Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam

Oleh:

**EVANIA LESTARI
NPM : 1351010216
Program Studi : Ekonomi Syari'ah**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H/ 2020 M**

**EFEKTIVITAS PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN (PNPM-MPd)
DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN
MASYARAKAT DITINJAU DARI
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

(Studi UPK Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam

Oleh:

**EVANIA LESTARI
NPM : 1351010216**

Program Studi : Ekonomi Syari'ah

**Pembimbing I : Dr. Moh. Bahrudin, M.Ag
Pembimbing II : Suhendar, S.E., M.S.Ak., Akt**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H/ 2020 M**

ABSTRAK

Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi UPK Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)

Oleh:

Evania Lestari

Salah satu program pemberdayaan masyarakat yang target sarasannya tertuju pada masyarakat perdesaan adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd). Penulis melakukan penelitian ini di UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kecamatan Natar Lampung Selatan. Rumusan masalah yang penulis ambil dalam penelitian ini adalah Bagaimana Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, Apa kendala yang dihadapi dalam menjalankan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd), Bagaimana pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*). Dalam penelitian ini penulis menggunakan *Simple Random Sampling* dan *Cluster Sampling*. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Kecamatan Natar, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) sudah efektif karna sangat membantu masyarakat dalam mengembangkan usahanya serta dapat menjadikan usaha tersebut sebagai mata pencarian agar kebutuhan sehari-hari dapat terpenuhi. Kendala yang dihadapi dalam menjalankan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan ini yaitu dimulai dari sosialisasi kurang maksimal, sulitnya mengumpulkan masyarakat untuk menghadiri sosialisasi, macetnya usaha peminjam, penyalahgunaan dana SPP. Pelaksanaan PNPM Mandiri tidak sesuai dengan sistem Ekonomi Islam karna di dalamnya terdapat bunga yang dilarang oleh Islam.

Kata Kunci: *Efektivitas, PNPM Mandiri Perdesaan, Perekonomian, Ekonomi Islam*



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jln. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp: 703289

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam
Nama Mahasiswa : Evania Lestari
NPM : 1351010216
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, Januari 2020


Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Moh. Bahrudin, M.Ag
NIP. 195808241989031003


Suhendar, S.E., M.S.Ak., Akt
NIP. 198510302019031004

Ketua Prodi Ekonomi Syariah


Madnasir, S.E., M.Si
NIP. 197504242002121001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jln. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung. Tlp : 703289.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **EFEKTIVITAS PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN (PNPM-MPd) DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi UPK Kecamatan Natar, Lampung Selatan).**

Disusun oleh: **Evania Lestari, NPM: 1351010216, Jurusan: Ekonomi Syaria'h.** Telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **Jum'at, 03 Januari 2020.**

TIM MUNAQSAH

Ketua : Dr. H. Nasrudin, M.Ag

Sekretaris : Weny Rosilawati, S.E., MM

Penguji I : Deki Fermansyah, S.E., M.Si

Penguji II : Suhendar, S.E., M.S.Ak., Akt

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I

NIP. 19800801 200312 1 001

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (Q.S Al-Ma'idah (5):2)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua penulis Ayahanda tercinta Erizon Malian dan Ibunda tercinta Kurniati, yang telah memberikan kasih dan sayang nya kepada penulis serta tidak henti-hentinya berdoa dan berjuang untuk keberhasilan anak-anaknya.
2. Kakak tersayang Erika Dian Puspita dan adik-adik tersayang Dhenny Febriansyah dan Ghifari Juniansyah yang selalu memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
3. Teddy Kurniawan yang telah membantu penulis mulai dari penelitian hingga skripsi ini selesai.
4. Teman-teman seperjuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam angkatan 2013, yang sama-sama berjuang dalam menyelesaikan skripsi.
5. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tempat penulis menimba ilmu hingga penulis mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang senantiasa memberi kenikmatan dan kasih sayang tiada terkira kepada hambanya. Shalawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi S1 jurusan Ekonomi Syari'ah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Atas bantuan berbagai pihak yang menyebabkan skripsi ini terwujud walaupun penuh dengan segala keterbatasan, maka penulis dengan ini menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Dr. Moh. Bahrudin, M.Ag. selaku Pembimbing I yang telah sabar membimbing dan meluangkan waktunya dari proses pengajuan judul hingga skripsi ini selesai.
3. Suhendar, S.E., M.S.Ak., Akt. selaku Pembimbing II yang telah sabar membimbing dan meluangkan waktunya hingga skripsi ini selesai.
4. Madnasir, S.E., M.Si selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syari'ah yang telah membantu dan selalu memberikan dukungan moril untuk menyelesaikan skripsi ini.

5. Seluruh dosen pengampu mata kuliah Prodi Ekonomi Syari'ah yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis dari semester awal hingga semester akhir.
6. Seluruh dosen-dosen di akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, atas segala bantuan dan pelayanannya.
7. Seluruh pengelola PNPM di UPK Kecamatan Natar Lampung Selatan, atas bantuan dan kerjasamanya dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini dari sebelum melakukan riset hingga riset selesai, dan membantu memberikan data yang penulis butuhkan.

Semoga semua kebaikan dan jasa Bapak, Ibu, dan Saudara/i sekalian menjadi amal ibadah dan selalu mendapat ridho dari Allah SWT, *Amin Ya Robbal 'Alamiin*. Akhirnya, dengan segala keterbatasan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi orang banyak.

Bandar Lampung, Januari 2020

Penulis,

Evania Lestari
NPM. 1351010216

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Rumusan Masalah	11
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
F. Tinjauan Pustaka	13
G. Metode Penelitian	15
 BAB II KAJIAN TEORI	
A. Konsep Efektivitas	19
1. Pengertian Efektivitas	19
2. Pengukuran Efektivitas	21
B. Pemberdayaan Masyarakat	22
1. Definisi Pemberdayaan Masyarakat	22
2. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat	28
3. Konsep Pemberdayaan Masyarakat	29
4. Pendekatan Dalam Pemberdayaan Masyarakat	32
5. Peran Pemerintah	33
6. Pemberdayaan Masyarakat Melalui PNPM Mandiri	35
7. Dasar Hukum PNPM Mandiri	43
8. Kategori Program	46
9. Komponen Program	46
10. Pendanaan PNPM Mandiri Perdesaan	48
11. Pengelolaan Dana Bergulir	53
C. Tinjauan Tentang Pinjaman	55

1. Pengertian Pinjaman	55
2. Jenis-Jenis Pinjaman Modal	56
D. Pendapatan	58
1. Pengertian Pendapatan	58
2. Macam-Macam Pendapatan	60
3. Pembagian Pendapatan	60
4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan	61
E. Tinjauan Pinjaman Dalam Islam	62
1. Hutang Piutang (<i>Qardh</i>)	62
2. Dasar Hukum <i>Qardh</i>	64

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Natar	68
1. Letak Geografis Kecamatan Natar	68
2. Administrasi Pemerintahan	69
3. Penduduk	69
4. Pendidikan	70
5. Pertanian	71
B. PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Natar	72
1. Sejarah Berdirinya PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Natar	72
2. Pelaku-Pelaku PNPM Mandiri Perdesaan	73
3. Struktur Kepengurusan	79
C. Wawancara Tentang Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Kecamatan Natar	80
1. Wawancara Dengan Pengurus UPK Kecamatan Natar	80
2. Wawancara Dengan Anggota Peminjam Tentang Sosialisasi Kegiatan... ..	83
3. Wawancara Dengan Anggota Peminjam Tentang Penggunaan Pinjaman Dan Pendapatan	83
4. Wawancara Tentang Tanggapan Dalam Mengikuti Program Pinjaman PNPM Mandiri	90

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Efektivitas Pinjaman Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Natar	92
B. Kendala Yang Dihadapi Dalam Menjalankan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Kecamatan Natar	97
C. Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam	99

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	102
B. Saran	102

DAFTAR PUSTAKA 104

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Desa dan Alokasi Pinjaman	9
Tabel 3.1 : Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kecamatan Natar	69
Tabel 3.2 : Jenis pekerjaan penduduk di Kecamatan Natar	70
Tabel 3.3 : Banyaknya Sekolah menurut Tingkatan Sekolah dan Jenis Sekolah di Kecamatan Natar	70
Tabel 3.4 : Luas panen dan produksi tanaman pangan di Kecamatan Natar ...	71
Tabel 4.1 : Pendapatan setelah memperoleh modal pinjaman PNPM Mandiri Perdesaan	94
Tabel 4.2 : Pinjaman usaha yang tidak mendapat penghasilan	94
Tabel 4.3 : Pendapatan Setelah Memperoleh Modal Pinjaman PNPM Mandiri Perdesaan	95
Tabel 4.4 : Pendapatan Setelah Memperoleh Modal Pinjaman PNPM Mandiri Perdesaan	96

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum penulis membahas lebih lanjut tentang skripsi ini terlebih dahulu penulis akan jelaskan pengertian judul. Hal ini untuk menghindari penafsiran yang berbeda dikalangan pembaca. Maka perlu adanya suatu penjelasan dengan memberi arti beberapa istilah yang terkandung dalam judul skripsi ini.

Adapun judul skripsi ini adalah **“Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada UPK Kecamatan Natar Lampung Selatan)”**.

1. Efektivitas

Efektivitas adalah ukuran yang menyatakan sejauh mana sasaran atau tujuan (kuantitas, kualitas, dan waktu) telah dicapai.¹

2. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd)

PNPM Mandiri Perdesaan adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat.²

¹ Aan Komariah dan Cepi Triatna, *Visionary Leadership Menuju Sekolah Efektif*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), h. 34

3. Perekonomian

Perekonomian adalah sasaran dari pembangunan, atau dengan kata lain *output* dari pembangunan.³

4. Ekonomi Islam

Ekonomi Islam berasal dari dua kata ekonomi dan Islam.⁴ Ekonomi Islam adalah kumpulan prinsip umum tentang perilaku ekonomi umat yang diambil dari Al Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW dan pondasi ekonomi tersebut dibangun atas dasar pokok-pokok itu dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan waktu.⁵

Berdasarkan uraian-uraian istilah di atas, maka penulis mengambil kesimpulan yaitu mengukur seberapa jauh target sasaran pembangunan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat di perdesaan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) dengan berpedoman pada ketetapan Al-Qur'an dan Sunnah.

B. Alasan Memilih Judul

1. Alasan Objektif

PNPM Mandiri adalah program yang dibuat oleh pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan dan dapat membantu dalam perekonomian masyarakat yang membutuhkan melalui penyediaan layanan keuangan

² Pedoman Umum PNPM Mandiri, 2007, h. 11

³ Basuki Pujoalwanto, *Perekonomian Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h. 16

⁴ Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), h. 2

⁵ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012), h.10

berbasis pemberdayaan agar masyarakat dapat memulai, mengembangkan, dan meningkatkan usaha yang mereka miliki dan dapat membantu meningkatkan pendapatan keluarga.

Tetapi ada masyarakat yang masih menyalahgunakan pinjaman dari PNPM Mandiri untuk keperluan pribadi mereka dan bukan untuk mengembangkan usaha.

2. Alasan Subjektif

Penulis ingin meneliti apakah pinjaman PNPM Mandiri ini sudah efektif dalam membantu perekonomian masyarakat dan apakah benar pinjaman tersebut ada yang digunakan secara konsumtif oleh masyarakat yang meminjam di UPK Kecamatan Natar.

C. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan problem sosial yang berdampak sistemik bagi kehidupan masyarakat. Kemiskinan didefinisikan sebagai standar hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Secara ekonomis, kemiskinan juga dapat diartikan sebagai kekurangan sumberdaya yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang. Kemiskinan memberi gambaran situasi serba kekurangan seperti terbatasnya modal yang dimiliki, rendahnya pengetahuan dan keterampilan, rendahnya produktifitas, rendahnya pendapatan, lemahnya nilai

tukar hasil produksi orang miskin dan terbatasnya kesempatan berperan serta dalam pembangunan.⁶

Al-Ghazali mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Ketidakmampuan untuk memenuhi apa yang tidak dibutuhkan bukanlah kemiskinan. Jika barang yang dibutuhkan tersedia dan terjangkau oleh seseorang, maka dia tidak akan diperlakukan sebagai orang miskin. Al-Ghazali membagi kemiskinan menjadi dua bagian: 1) kemiskinan dalam kaitannya dengan kebutuhan material dan 2) kemiskinan dalam kaitannya dengan kebutuhan rohani.⁷

Di Indonesia, kemiskinan merupakan masalah sosial yang senantiasa relevan untuk dikaji terus menerus. Ini bukan saja karena kemiskinan telah ada sejak lama, melainkan pula karena masalah ini masih hadir ditengah-tengah kita dan bahkan kini gejala semakin meningkat sejalan dengan krisis multidimensi.⁸ Pemberdayaan ekonomi rakyat dalam kerangka pengentasan kemiskinan sangatlah penting untuk mengetahui potensi ekonomi lokal dari berbagai sektor.⁹ Kondisi perekonomian suatu negara dapat dikatakan mengalami pertumbuhan apabila output ekonomi yang dicapai sekarang lebih tinggi dari pada yang dicapai pada masa sebelumnya. Pertumbuhan tercapai

⁶ Faisal H. Basri, *Perekonomian Indonesia Tantangan dan Harapan Bagi Kebangkitan Ekonomi Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2002), h. 98

⁷ Nurul Huda, dkk, *Ekonomi Pembangunan Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h.23

⁸ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005), h. 131

⁹ Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h. 204

bila jumlah fisik barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan dalam perekonomian suatu negara bertambah besar dari waktu-waktu sebelumnya.¹⁰ Beberapa pandangan menyebutkan betapa pertumbuhan ekonomi menjadi penting dalam penyelenggaraan pembangunan negara.

Dalam Islam, kemiskinan dianggap sebagai musibah yang harus dihapuskan dari masyarakat. Sebab konsekuensi kemiskinan adalah kekafiran yang dianggap sebagai sebuah kejahatan. Allah SWT melalui Firman-Nya mengharuskan kepada umat manusia untuk menjauhi sikap malas dan memerintahkan hamba-Nya untuk senantiasa bekerja dan berusaha untuk memperoleh rezeki dan anugerah dari-Nya. Bahkan dalam Al-Qur'an ditegaskan bahwa setiap individu haruslah mencari kesibukan dengan bekerja keras. Sebagaimana firman Allah SWT Al- Insyirah (94) ayat 7:

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ﴿٧﴾

Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). (Q.S Al- Insyirah (94):7)

Islam tidak memandang kemiskinan sebagai masalah kultural karena Allah telah mewajibkan kepada manusia untuk mencari nafkah. Firman Allah pada Q.S Al Mulk ayat 15:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۚ وَإِلَيْهِ
النُّشُورُ ﴿١٥﴾

¹⁰ *Op.Cit*, Basuki, h. 89

Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajalah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nyalah kami (kembali setelah) dibangkitkan.(Q.S Al Mulk (67):15)

Untuk menanggulangi kemiskinan dan sekaligus pemeratakan pembangunan dan hasil-hasilnya, diperlukan upaya untuk memadukan berbagai kebijaksanaan dan program pembangunan yang tersebar di berbagai sektor dan wilayah.¹¹ Di sektor ekonomi, wilayah pedesaan di Indonesia juga menjadi sumber kehidupan karena Indonesia adalah negara agraris. Oleh karena itu, pembangunan di Indonesia akan kurang mempunyai arti bila tidak dilakukan pembangunan masyarakat desa. Pembangunan Masyarakat Desa yang sekarang disebut juga dengan nama Pemberdayaan Masyarakat Desa, pada dasarnya serupa dan setara dengan konsep Pengembangan Masyarakat (*community development* atau CD).

Dari latar belakang kemiskinan yang terjadi inilah diimplementasikan suatu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri untuk mengatasi kemiskinan yang ada di Indonesia yang diluncurkan pada tanggal 30 April 2007 tepatnya di kota Palu, Sulawesi Tengah berdasarkan putusan 25/KEP/MENKO/KESRA/VII/2007 tentang pedoman umum PNPM Mandiri. yang merupakan suatu program pemerintah untuk mengatasi kemiskinan berbasis pemberdayaan kepada masyarakat miskin yang salah satu komponen

¹¹ Ginandjar Kartasmita, *Pembangunan Untuk Rakyat* (Jakarta: Pustaka Cidesindo, 1996), h.241

programnya yaitu BLM (Bantuan Langsung Masyarakat).¹² Pemerintah Indonesia mencanangkan program PNPM Mandiri yang terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, serta PNPM Mandiri Wilayah Khusus dan Desa Tertinggal.¹³ Program Mandiri Perdesaan memiliki dua program fisik dan non fisik. Program fisik meliputi pembangunan sarana prasarana di perdesaan, sedangkan program non fisik meliputi simpan pinjam perempuan (SPP). Program ini menyediakan fasilitas pemberdayaan masyarakat atau kelembagaan lokal, pendampingan, pelatihan, dan bantuan langsung untuk masyarakat kepada masyarakat secara langsung.

PNPM Mandiri membantu dalam hal permodalan dan berupa pemberian dana pinjaman bergulir kepada masyarakat yang akan mengembangkan usaha. PNPM salah satu kebijakan dari pemerintah untuk lebih memberdayakan masyarakat dalam kehidupan ekonominya. Dalam hal ini pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Program PNPM agar masyarakat lebih mandiri dalam meningkatkan taraf kehidupannya atas usaha kecil dan menengah melalui program bantuan modal dari pemerintah. Pelaksanaan program pemberdayaan juga menunjukkan peran pemerintah dalam manajemen pembangunan yang mendasar termasuk dalam penyelenggaraan fungsi pembangunan sosial ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat. PNPM Mandiri Perdesaan merupakan

¹² Intan Sumiyati, Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung. Volume 1, Nomor 1, 2013. (eJournal Pemerintahan Integratif), 05-10-2017

¹³ Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, *Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan*, (Jakarta, 2007), h. 3

program Pemerintah pusat bersama Pemerintah Daerah artinya program ini direncanakan, dilaksanakan, dan didanai bersama-sama berdasarkan persetujuan dan kemampuan yang dimiliki oleh Pemerintah pusat dan Daerah.

Kecamatan Natar terdiri dari 26 desa. Dengan topografi berupa dataran maka banyak di manfaatkan untuk lahan pertanian. Sehingga sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai petani dan pedagang. Di Kecamatan Natar juga terdapat banyak industri. Keberadaan usaha industri pengolahan sangat berpengaruh pada kehidupan perekonomian masyarakat Kecamatan Natar, karena usaha industri ini dapat menyerap tenaga kerja dan sebagai salah satu mata pencaharian masyarakat sekitar usaha industri ini. Beberapa faktor penghambat pembangunan industri yaitu penguasaan teknologi yang masih perlu ditingkatkan, mutu barang yang dihasilkan masih kalah bersaing, jenis-jenis barang tertentu bahan bakunya masih sangat tergantung dengan negara lain, serta modal yang dimiliki masih relatif kecil.¹⁴ Padahal modal dianggap unsur yang paling penting dalam pengembangan usaha bagi masyarakat perdesaan, keterbatasan modal menjadi penyebab kreatifitas dalam pengembangan usaha menjadi terhambat. Keterbatasan modal dipicu oleh lembaga-lembaga keuangan formal atau komersial ragu untuk mengucurkan pinjaman kepada pelaku usaha mikro kecil yang mayoritas para pelaku usaha mikro dan kecil tidak *bankable* atau tidak lolos pada analisis pemberian kredit. Akibatnya, sejumlah besar usaha-usaha skala kecil tidak dapat mengembangkan usahanya karena terkendala oleh modal.

¹⁴ BPS Kabupaten Lampung Selatan, *Statistik Daerah Kecamatan Natar, 2015*, h. 10

Karna itu untuk mempermudah masyarakat di Kecamatan Natar dalam mengembangkan usahanya, pemerintah mengajak masyarakat yang kurang mempunyai modal untuk bergabung dalam Program PNPM Mandiri Perdesaan. Dengan adanya pinjaman dari PNPM atau yang sering disebut dengan simpan pinjam perempuan adalah kegiatan penyediaan modal untuk membuka, mengembangkan dan meningkatkan usaha dengan harapan masyarakat miskin bisa memanfaatkan pinjaman tersebut sehingga masyarakat yang tidak mampu dapat meningkatkan pendapatannya. Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan telah mendapat alokasi dana yang dikucurkan di dalam kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Natar.

Tabel 1.1
Desa dan Alokasi Pinjaman
Unit PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Natar
Periode 31 Desember 2018

No.	Desa	Tingkat Perkembangan Kelompok			Alokasi
		Pemula	Berkembang	Siap	
1	Sidosari	5	2		455.370.000
2	Hajimena	6	20		1.696.214.000
3	Pemanggilan	3	13		1.520.938.000
4	Natar	14	25		1.909.049.000
5	Krawangsari	1	8		824.050.000
6	Muara Putih	1	6		456.560.000
7	Rejosari	2	1		297.500.000
8	Bumisari	6	12		1.161.500.000
9	Candimas	2	45		4.262.645.000
10	Haduyang	5	0		393.500.000
11	Tanjungsari	1	13		857.000.000
12	Banjar Negeri	4	18		2.050.665.500
13	Rulung Helok	1	10		579.920.000
14	Rulung Raya	2	0		185.500.000
15	Mandah	0	30		2.448.000.000
16	Purwosari	2	5		465.500.000

17	Pancasila	3	0		60.000.000
18	Bandarejo	4	0		187.332.500
19	Sukadamai	0	38	10	2.578.760.000
20	Negararatu	5	31		2.713.966.000
21	Merak Batin	3	47		3.207.645.000
22	Branti Raya	10	4		889.960.500
23	Rulungsari	0	2		266.000.000
24	Kalisari	2	14		954.000.000
25	Waysari	0	5		409.500.000
26	Rulung Mulya	0	3		183.370.000
Total		82	352	10	31.039.455.500

Sumber Data : Laporan Keuangan UPK PNPM Mandiri Kecamatan Natar, per 31 Desember 2018

Berdasarkan data Unit PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Natar tersebut dapat dijelaskan bahwa pinjaman yang diberikan pada Periode 31 Desember 2018 mencapai Rp. 31.039.455.500 rupiah. Menurut sekretaris UPK yang sempat penulis wawancarai, tidak semua pinjaman tersebut digunakan bersifat produktif tetapi ada yang digunakan bersifat konsumtif. Menurut salah satu ketua kelompok yang sempat penulis wawancarai juga, setiap bulan saat waktu jatuh tempo untuk penyetoran ke UPK pasti masih ada salah satu anggota yang belum melunasi sesuai dengan ketentuan pembayaran tiap bulannya. Ini menjadi keluhan tersendiri untuk setiap ketua yang bertanggung jawab untuk menyetorkannya.

Dari permasalahan di atas penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang pinjaman Unit PNPM-MPd tersebut apakah sesuai dengan tujuan yaitu memberdayakan, memberikan modal untuk menumbuh kembangkan usaha-usaha masyarakat miskin dan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat, dan apakah sesuai dengan ekonomi islam, maka penulis mengambil judul **“Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan**

Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada UPK Kecamatan Natar Lampung Selatan)”.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam menjalankan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) tersebut?
3. Bagaimana pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) ditinjau dari perspektif Ekonomi Islam?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui bagaimana Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Kecamatan Natar.
- b. Untuk mengetahui apa kendala yang dihadapi dalam menjalankan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) tersebut.

- c. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) ditinjau dari perspektif Ekonomi Islam.

2. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian tentunya diharapkan akan memberikan manfaat yang berguna, khususnya bagi ilmu pengetahuan dibidang penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

a. Bagi Penulis

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat sebagai media aplikasi teori dan penerapan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan, sekaligus menambah wawasan dan pengetahuan, khususnya dalam memahami penerapan program pemerintah kepada masyarakat desa.

b. Bagi Masyarakat

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat sebagai informasi mengenai pelaksanaan PNPM Mandiri di wilayah Perdesaan. Melalui informasi ini, diharapkan bagi masyarakat yang belum mengikuti program PNPM Mandiri tersebut untuk lebih aktif dalam mengikuti program-program yang akan dilaksanakan selanjutnya.

F. Tinjauan Pustaka

Hasil dari penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini akan dibahas secara singkat untuk dapat mengetahui dan membandingkan hasil dari perbedaan dengan penelitian ini, yaitu hasil penelitian oleh:

1. Intan Setya Gita Risiya Sari dan Yoyoks Soesatyo, Universitas Negeri Surabaya, dengan judul penelitian *“Peran dan Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Terhadap Pendapatan Masyarakat Miskin Di Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto”*, menjelaskan bahwa peran PNPM dalam meningkatkan pendapatan masyarakat miskin menunjukkan hasil yang signifikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas PNPM dalam meningkatkan pendapatan masyarakat miskin sudah berjalan cukup efektif. Hal ini berarti bahwa terjadi peningkatan pendapatan sebelum dan sesudah menggunakan dana PNPM.¹⁵
2. Nor Aida, IAIN Antasari Banjarmasin, dengan judul skripsi *“Efektivitas Pinjaman Dana Bergulir PNPM-Mpd Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar”*. Hasil Penelitian menunjukan bahwa Efektivitas Program SPP PNPM-MPd di Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar interpretasinya adalah tergolong cukup efektif dengan Indeks Kepuasan

¹⁵ Intan Setya Gita R.S & Yoyok Soesatyo, *“Peran dan Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Terhadap Pendapatan Masyarakat Miskin Di Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto”*. (Skripsi Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya), h. 1

Masyarakat sebesar 3. PNPM Mandiri dapat membantu dalam meningkatkan tumbuhnya usaha kecil dan menengah yang ada pada masyarakat desa, yang selama ini bergantung pada pinjaman dan kekurangan modal, sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat agar masyarakat dapat memperoleh kesejahteraan.¹⁶

3. Syukron Munjazi, UIN Sunan Kalijaga, dengan judul skripsi *“Pemberdayaan Masyarakat Untuk Mengurangi Kemiskinan Melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri (Studi kasus Implementasi di Kelurahan Demangan, Gondokusuman, Yogyakarta).”* Hasil dari penelitian ini yaitu proses pemberdayaan masyarakat partisipatoris yang dilakukan oleh BKM melalui program pinjaman bergulir dari dana PNPM-Mandiri, yang berdampak positif terhadap penurunan kemiskinan di Kelurahan Demangan, dan dicapai dari proses panjang dalam menggugah partisipasi aktif masyarakat untuk mensukseskan program BKM tersebut, dan hasilnya dapat menekan angka kemiskinan pada setiap periode yang terjadi di Kelurahan Demangan. Untuk itu keberhasilan pemberdayaan yang dilakukan, merupakan wujud dari adanya kerjasama yang saling menguntungkan antara berbagai elemen masyarakat baik dari tingkat pemerintah, swasta, akademisi, serta masyarakat.¹⁷

¹⁶ Nor Aida, *“Efektivitas Pinjaman Dana Bergulir PNPM-MPd Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar”*. (Skripsi Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam, IAIN Antasari, 2015), h. 6

¹⁷ Syukron Munjazi, *“Pemberdayaan Masyarakat Untuk Mengurangi Kemiskinan Melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri (Studi kasus Implementasi di*

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang langsung di lapangan atau pada responden.¹⁸ Selain itu, peneliti juga menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literature (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu.¹⁹ Sesuai dengan judul dan fokus permasalahan yang diambil, maka sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data sebagai berikut:

a. Data Primer

Data Primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.²⁰ Data primer dalam penelitian ini akan diperoleh langsung dari lokasi penelitian yaitu pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) di Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan.

Kelurahan Demangan, Gondokusuman, Yogyakarta). (Skripsi Fakultas Dakwah, UIN Sunan Kalijaga, 2009)

¹⁸ Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi dan Aplikasinya* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), h.11

¹⁹ Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h.8

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 193

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan. Data ini biasanya digunakan untuk melengkapi data primer.²¹ Data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah data penunjang yang didapatkan dari Kantor UPK PNPM-MPd Kecamatan Natar, dan juga data dari luar seperti jurnal, internet, artikel, dan lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara yaitu pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data, apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.²² Dalam penelitian ini yang akan diwawancara yaitu Ketua PNPM-MPd dan sebagian anggota kelompok PNPM-MPd Kecamatan Natar.

²¹ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori & Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h.88

²² Sugiyono, *Op. Cit*, h. 410-411

b. Observasi

Nasution menyatakan bahwa, observasi adalah dasar dari semua ilmu pengetahuan.²³ Dalam penelitian ini penulis akan melakukan observasi di Unit Pelaksanaan Kegiatan (UPK) Kec. Natar Lampung Selatan yaitu dengan melihat pelaksanaan program-program PNPM Mandiri yang terlaksana dan tidak terlaksana.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dalam penelitian ini dokumen yang penulis ambil bersumber dari Unit Pelaksanaan Kegiatan (UPK) Kec. Natar Lampung Selatan.

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh anggota peminjam PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan yang terdiri dari 444 kelompok.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi individu yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis menggunakan *Purposive Sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.

²³ *Ibid*, h.403

Artinya penelitian ini mengambil sampel dari sumber data atau orang yang dianggap paling tau tentang apa yang penulis harapkan.²⁴ Penulis mengambil sampel 5 kelompok secara acak dari 444 kelompok yang ada di Kecamatan Natar. Dalam setiap kelompok terdiri dari rata-rata 5 orang.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan tahapan yang kritis dalam proses penelitian bisnis dan ekonomi. Tujuan utamanya adalah menyediakan informasi untuk memecahkan masalah.²⁵ Setelah semua data hasil penelitian terkumpul, selanjutnya data dianalisis dengan menggunakan analisis data yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu menganalisis data yang berhasil penulis kumpulkan kemudian ditampilkan dalam bentuk kalimat yang diteliti sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada dengan menggunakan pemikiran deduktif.²⁶

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis memaparkan informasi-informasi faktual yang diperoleh dari UPK di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, yang berkaitan dengan Pelaksanaan Program PNPM.

²⁴ *Ibid*, Sugiono, h. 392

²⁵ Mudrajat Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2003), h. 164

²⁶ Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research*, (Yogyakarta: ANDI, 2004), h. 41

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif berarti dapat membuahkan hasil, mulai berlaku, ada pengaruh/akibat/efeknya. Efektivitas bisa juga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan.¹ Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah yang secara sadar telah ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa kegiatan yang dijalankan. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan, jika hasil sasaran mendekati sasaran, berarti semakin tinggi efektivitasnya.²

Menurut Supriyono, efektivitas adalah hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran yang mesti dicapai, semakin besar kontribusi daripada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif pula unit tersebut.³ Sedangkan menurut Gibson dkk mengartikan efektivitas dengan menggunakan pendekatan sistem yaitu: 1) seluruh siklus *input*-proses-

¹Sulkan Yasin dan Sunarto Hapsoyo, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Praktis, Populer dan Kosa Kata Baru*, (Surabaya: Mekar, 2008), h. 132

²Sondang P. Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), h. 4

³Supriyono, *Sistem Pengendalian Manajemen*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2000), h.29

output, tidak hanya *output* saja, dan 2) hubungan timbal balik antara organisasi dan lingkungannya.

Pengertian efektivitas menurut beberapa ilmuwan adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Agung Kurniawan efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.⁴
- b. Menurut Mahmudi efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan.⁵

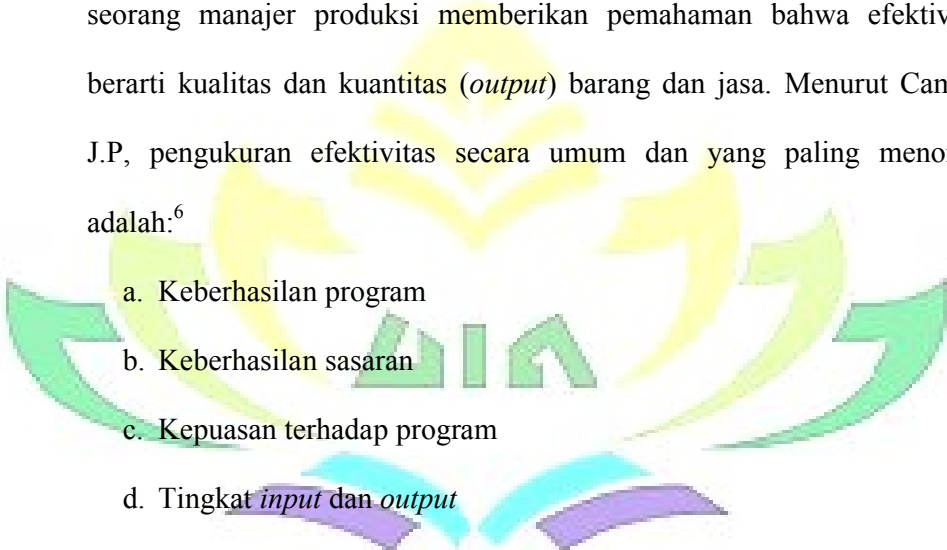
Dari beberapa pengertian efektivitas yang dikemukakan oleh para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah tolak ukur yang menyatakan berhasil tidaknya suatu program atau kegiatan untuk mencapai tujuan dan mencapai target-targetnya yang telah ditentukan. Tingkat efektivitas suatu program perlu diukur agar dapat mengetahui berhasil tidaknya program yang telah direncanakan sebelumnya. Melalui pengukuran efektivitas dapat menjadi pertimbangan mengenai lanjut atau tidak program tersebut.

⁴Agung Kurniawan, *Transformasi Pelayanan Publik*, (Yogyakarta: Pamburuan, 2005), h. 109

⁵Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN,2005), h. 92

2. Pengukuran Efektivitas

Mengukur efektivitas suatu program kegiatan bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (*output*) barang dan jasa. Menurut Cambel J.P, pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol adalah:⁶

- 
- a. Keberhasilan program
 - b. Keberhasilan sasaran
 - c. Kepuasan terhadap program
 - d. Tingkat *input* dan *output*
 - e. Pencapaian tujuan menyeluruh

Adapun kriteria lain untuk mengukur efektivitas ada tiga pendekatan yaitu:⁷

- a. Pendekatan Sumber yakni mengukur efektivitas dari *input*. Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya, baik fisik maupun nonfisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.

⁶Cambel, *Riset dalam Efektivitas Organisasi*, Terjemahan Salut Simamora, (Jakarta: Erlangga, 1989), 121

⁷Martani dan Lubis, *Manajemen Modern*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1987), h.55

- b. Pendekatan Proses yakni untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses *internal* atau mekanisme organisasi.
- c. Pendekatan Sasaran yakni dimana pusat perhatian pada *output*, mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil yang sesuai dengan rencana.

Dari ketiga kriteria untuk mengukur efektivitas yang dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ukuran efektivitas digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu program atau kegiatan dapat melaksanakan fungsi-fungsinya secara optimal sehingga tercapainya semua target, sasaran dan tujuan yang akan dicapai.

B. Pemberdayaan Masyarakat

1. Definisi Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan berasal dari bahasa Inggris "*empowerment*" yang biasa diartikan sebagai pemberkuasaan. Dalam arti pemberian atau peningkatan "kekuasaan" (*power*) kepada masyarakat yang lemah atau tidak beruntung.⁸ Istilah pemberdayaan diartikan sebagai upaya memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh individu, kelompok dan masyarakat luas agar mereka memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkungannya agar dapat memenuhi keinginan-keinginannya, termasuk aksesibilitasnya terhadap sumberdaya yang terkait

⁸ Abu Hurairah, *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat Model dan Strategi Pembangunan yang Berbasis Kerakyatan*, (Bandung: Humaniora, 2008), hal. 82

dengan pekerjaanya, aktivitas sosialnya, dll.⁹ Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam, a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan, bebas dari kelaparan, kebodohan dan kesakitan, b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang dan jasa yang mereka perlukan, c) berpartisipasi dalam proses pembangunan.¹⁰

Pemberdayaan adalah suatu proses yang berjalan terus-menerus untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya, upaya itu hanya bisa dilakukan dengan membangkitkan keberdayaan mereka, untuk memperbaiki kehidupan di atas kekuatan sendiri. Asumsi dasar yang dipergunakan adalah bahwa setiap manusia mempunyai potensi dan daya, untuk mengembangkan dirinya menjadi lebih baik. Dengan demikian, pada dasarnya manusia itu bersifat aktif dalam upaya peningkatan keberdayaan dirinya. Dalam rangka pemberdayaan ini upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan dan derajat kesehatan serta akses ke dalam kemampuan sumber ekonomi seperti modal, keterampilan, teknologi, informasi dan lapangan

⁹ Mubyanto, *Membangun Sistem Ekonomi*, (Yogyakarta: BPFE, 2000), h. 263

¹⁰ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), h. 58

kerja, pemberdayaan ini menyangkut pembangunan sarana dan prasarana dasar, baik fisik maupun non fisik.¹¹

Di dalam melakukan pemberdayaan, keterlibatan pihak yang diberdayakan sangatlah penting sehingga tujuan dari pemberdayaan dapat tercapai secara maksimal. Program yang mengikutsertakan masyarakat memiliki beberapa tujuan, yaitu agar bantuan tersebut efektif karena sesuai dengan kehendak dan mengenali kemampuan serta kebutuhan mereka., serta meningkatkan keberdayaan (*empowering*) pihak yang diberdayakan dengan pengalaman merancang, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan upaya peningkatan diri ekonomi.¹² Meskipun pemberdayaan masyarakat bukan semata-mata konsep ekonomi, tetapi sering ditujukan untuk tujuan pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat.¹³ Penuntasan kemiskinan tidak sekedar meningkatkan pendapatan, tetapi perlu dilakukan secara holistik yang menyangkut aspek kehidupan dasar manusia seperti, gizi dan kesehatan, ketersediaan lapangan pekerjaan, jumlah keluarga dan anggotanya, tingkat pendidikan, lingkungan, serta aspek lain yang dapat meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Penuntasan kemiskinan dapat dicapai dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat. Karena melalui kegiatan pemberdayaan semua potensi yang dimiliki masyarakat didorong dan ditingkatkan untuk berdaya

¹¹ Engking Soewarman Hasan, *Strategi Menciptakan Manusia Yang Bersumber Daya Unggul*, (Bandung: Pustaka Rosda Karya, 2002), hal 56-57

¹² Ginanjar Kartasasmita, *Pemberdayaan Masyarakat : Konsep Pembangunan Yang Berakar Pada Masyarakat*. (Jakarta: Bappenas, 1996), h. 249

¹³ Oos M. Anwar, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*, Cetakan Kedua, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 48

dalam melawan faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan. Kegiatan pemberdayaan tersebut dilakukan melalui berbagai kegiatan yang dapat mendorong kemampuan dan keterampilan yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat, menciptakan berbagai kesempatan kerja, menghidupkan kembali budaya dan kearifan-kearifan lokal sebagai modal sosial, serta mengubah *mindset* masyarakat untuk berdaya dan mandiri.

Di samping dapat dilihat dari bidang-bidang yang terlibat dalam suatu pemberdayaan masyarakat, upaya pemberdayaan masyarakat juga dapat dilihat dari sisi keberadaannya sebagai suatu proses, dimana pemberdayaan dilihat dari tahap-tahap kegiatan guna mencapai suatu tujuan, yakni: **pertama**, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat dapat berkembang (*enabling*). Yaitu dimulai dengan pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat memiliki potensi untuk dikembangkan. Artinya tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong, memotivasikan dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*). Dalam rangka ini, diperlukan langkah-langkah yang lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Dalam rangka pemberdayaan ini, upaya yang penting dilakukan adalah peningkatan taraf pendidikan, dan derajat kesehatan, serta akses ke dalam sumber-sumber

kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar.

Ketiga, yaitu memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian (*charity*).¹⁴

Islam memandang suatu pemberdayaan atas masyarakat madani sebagai suatu hal yang penting sehingga pemberdayaan dalam pandangan Islam akan memiliki pendekatan-pendekatan yang holistik dan strategis. Berkaitan dengan itu, Islam telah memiliki paradigma strategis dan holistik dalam memandang suatu pemberdayaan. Menurut Agus Ahmad Syarfi'i, pemberdayaan dapat diartikan sebagai penganut, dan secara teknis istilah pemberdayaan dapat disamakan dengan istilah pengembangan.¹⁵

Berdasarkan istilah diatas, dalam pengalaman Al-Qur'an tentang pemberdayaan *dhu'afa*, "*community empowerment*" (CE) atau pemberdayaan masyarakat pada intinya adalah membantu klien (pihak yang diberdayakan), untuk memperoleh daya guna pengambilan keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan tentang diri mereka,

¹⁴Soetomo, *Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 406

¹⁵Agus Ahmad Syarfi'i, *Manajemen Masyarakat Islam*, (Bandung: Gerbang Masyarakat Baru), h. 70

termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang dimilikinya antara lain melalui transfer daya dari lingkungannya.¹⁶

Kemiskinan dalam pandangan Islam bukanlah sebuah azab maupun kutukan dari Tuhan, namun disebabkan pemahaman manusia yang salah terhadap distribusi pendapatan (rezeki) yang diberikan. Al-Qur'an telah menyinggung dalam surah Az-Zukhruf (43): 32:

أَهْمٌ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۚ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۚ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. (Q.S Az-Zukhruf (43): 32)

Perbedaan taraf hidup manusia adalah sebuah rahmat sekaligus “peringat” bagi kelompok manusia yang lebih “berdaya” untuk saling membantu dengan kelompok yang kurang mampu. Pemahaman seperti inilah yang harus ditanamkan di kalangan umat Islam, sikap simpati dan empati terhadap sesama harus di pupuk sejak awal. Ini sejalan dengan firman Allah dalam surat Al-Hasyr (59) ayat 7:

¹⁶ Asep Usman Ismail, *Pengalaman Al-Qur'an Tentang Pemberdayaan Dhu'fa*, (Jakarta: Dakwah Press) Cet. Ke-1, h.9

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمْ
الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk beberapa negara, adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. (Q.S. Al-Hasyr (59):7)

Kedua ayat di atas menunjukkan bahwa kemiskinan berawal dari sikap dan perilaku umat yang salah dalam memahami ayat-ayat yang diturunkan Allah SWT, terutama pemahaman pada kepemilikan harta benda sendiri.

2. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik karena kondisi *internal* (misalnya persepsi mereka sendiri), maupun karena kondisi *eksternal* (misalnya ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil). Ada beberapa kelompok yang dapat dikategorikan sebagai kelompok lemah atau tidak berdaya meliputi:¹⁷

- a. Kelompok lemah secara struktural, naik lemah secara kelas, *gender*, maupun etnis.

¹⁷ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerja Sosial*, (Bandung: Ptevika Aditam, 2005) Cet Ke-1, h.60

- b. Kelompok lemah khusus, seperti manula, anak-anak, dan remaja penyandang cacat, gay dan lesbian, masyarakat terasing.
- c. Kelompok lemah secara personal, yakni mereka yang mengalami masalah pribadi atau keluarga.

Menurut Agus Syafi'i, tujuan pemberdayaan masyarakat adalah mendirikan masyarakat atau membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara seimbang. Karena pemberdayaan masyarakat adalah upaya memperluas horizon pilihan bagi masyarakat. Ini berarti masyarakat diberdayakan untuk melihat dan memilih sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya.¹⁸

3. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Konsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan masyarakat selalu dihubungkan dengan konsep mandiri, partisipasi, jaringan kerja, dan keadilan. Pada dasarnya pemberdayaan diletakkan pada kekuatan tingkat individu dan sosial. Partisipasi merupakan komponen penting dalam pembangkitan kemandirian dan proses pemberdayaan. Sebaiknya orang-orang harus terlibat dalam proses tersebut sehingga mereka dapat lebih memperhatikan hidupnya untuk memperoleh rasa percaya diri, memiliki harga diri dan pengetahuan untuk mengembangkan keahlian baru. Prosesnya dilakukan secara kumulatif sehingga semakin banyak ketrampilan yang dimiliki seseorang, semakin baik kemampuan

¹⁸Edi Suharto, *loc.cit.*

berpartisipasinya.¹⁹ Konsep pemberdayaan secara ringkas dapat dikemukakan sebagai berikut:²⁰

- a. Perekonomian rakyat adalah perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat. Perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat adalah bahwa perekonomian nasional yang berakar pada potensi dan kekuatan masyarakat secara luas untuk menjalankan roda perekonomian mereka sendiri. Pengertian rakyat adalah semua warga negara.
- b. Pemberdayaan ekonomi rakyat adalah usaha untuk menjadikan ekonomi yang kuat, besar, modern, dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang benar. Karena kendala pengembangan ekonomi rakyat adalah kendala struktural, maka pemberdayaan ekonomi rakyat harus dilakukan melalui perubahan struktural.
- c. Perubahan struktural yang dimaksud adalah perubahan dari ekonomi tradisional ke ekonomi modern, dari ekonomi lemah ke ekonomi kuat, dari ekonomi subsisten ke ekonomi pasar, dari ketergantungan ke kemandirian. Langkah-langkah proses perubahan struktur, meliputi: (1) pengalokasian sumber pemberdayaan sumberdaya; (2) penguatan kelembagaan; (3) penguasaan teknologi; dan (4) pemberdayaan sumberdaya manusia.
- d. Pemberdayaan ekonomi rakyat, tidak cukup hanya dengan peningkatan produktivitas, memberikan kesempatan berusaha yang sama, dan hanya memberikan suntikan modal sebagai stimulan, tetapi harus dijamin

¹⁹ Anwar, *Manajemen Pemberdayaan Perempuan*, (Bandung : Alfabeta, 2007), h. 3

²⁰ Sumodiningrat, Gunawan, *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial*. (Jakarta : Gramedia, 1999), h. 56

adanya kerjasama dan kemitraan yang erat antara yang telah maju dengan yang masih lemah dan belum berkembang.

- e. Kebijakannya dalam pembedayaan ekonomi rakyat adalah: (1) pemberian peluang atau akses yang lebih besar kepada aset produksi (khususnya modal); (2) memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi rakyat, agar pelaku ekonomi rakyat bukan sekadar *price taker*; (3) pelayanan pendidikan dan kesehatan; (4) penguatan industri kecil; (5) mendorong munculnya wirausaha baru; dan (6) pemerataan spasial.
- f. Kegiatan pemberdayaan masyarakat mencakup: (1) peningkatan akses bantuan modal usaha; (2) peningkatan akses pengembangan SDM; dan (3) peningkatan akses ke sarana dan prasarana yang mendukung langsung sosial ekonomi masyarakat lokal.

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan secara singkat bahwa konsep pemberdayaan dalam bidang ekonomi, tidak cukup hanya dengan pemberian modal bergulir, tetapi juga harus ada penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat, penguatan sumberdaya manusianya, dan penyediaan prasarananya. Untuk itu kemitraan antar usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar adalah jalan yang harus ditempuh. Pemberdayaan masyarakat dalam ekonomi adalah proses penguatan menuju ekonomi rakyat yang kokoh, modern, efisien, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi, tidak dapat dilakukan melalui pendekatan individu, melainkan harus melalui pendekatan kelompok.

4. Pendekatan dalam Pemberdayaan Masyarakat

Pendekatan utama dalam pemberdayaan masyarakat ialah dengan menjadikan masyarakat bukan sebagai objek pembangunan, tetapi juga subjek dari upaya pembangunan itu sendiri. Artinya, masyarakat itu sendiri yang mengembangkan potensi atau keberdayaannya sendiri sehingga mampu meningkatkan kualitas dan taraf kehidupan masyarakat itu sendiri. Berdasarkan konsep tersebut, maka pemberdayaan masyarakat harus mengikuti pendekatan sebagai berikut :

Pertama, upaya tersebut harus terarah. ini yang secara populer disebut. Upaya ini ditujukan langsung kepada yang memerlukan, dengan program yang dirancang untuk mengatasi masalahnya sesuai kebutuhannya. **Kedua**, program ini harus langsung mengikutsertakan atau bahkan dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran. Mengikutsertakan masyarakat yang akan dibantu mempunyai tujuan, yakni agar bantuan tersebut efektif karena sesuai dengan kehendak dan mengenali kemampuan masyarakat dengan pengalaman dalam merancang, melaksanakan, mengelola, dan mempertanggungjawabkan upaya peningkatan diri dan ekonominya. **Ketiga**, menggunakan pendekatan kelompok, karena secara sendiri-sendiri masyarakat miskin sulit dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Juga lingkup bantuan menjadi terlalu luas jika penanganannya dilakukan secara individu. Oleh karena itu pendekatan kelompok ini adalah paling efektif dan dilihat dari

penggunaan sumber daya juga lebih efisien.²¹

5. Peran Pemerintah

Kemandirian masyarakat adalah wujud dari pengembangan kemampuan ekonomi daerah untuk menciptakan kesejahteraan dan memperbaiki material secara adil dan merata yang ujungnya berpangkal pada pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat sendiri berdiri pada satu pemikiran bahwa pembangunan akan berjalan dengan sendirinya apabila masyarakat diberi hak mengelola sumberdaya alam yang mereka miliki dan menggunakannya untuk pembangunan masyarakatnya. Fungsi pemerintah dalam kaitannya dengan pemberdayaan yakni mengarahkan masyarakatnya pada kemandirian dan pembangunan demi terciptanya kemakmuran didalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini pemberdayaan masyarakat berarti tidak bisa dilepaskan dan diserahkan begitu saja kepada masyarakat yang bersangkutan. Pemberdayaan masyarakat yang optimal agar mampu memberdayakan diri menjadi lebih baik harus dengan terlibatnya Pemerintah secara optimal dan mendalam.²²

Dengan berbagai interpretasi yang bervariasi, saat ini hampir semua Departemen maupun Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) memiliki program pemberdayaan masyarakat sebagaimana terefleksi dalam Renstranya masing-masing. Demikian juga di Daerah, hampir semua Dinas atau Instansi juga memiliki program yang serupa. Beberapa daerah bahkan membentuk unit kerja otonom untuk mengawal proses

²¹*Op.cit*, Ginandjar Kartasasmita, h. 252

²²LukmanSutrisno, *Menuju Masyarakat Partisipatif*, (Yogyakarta: Kanisius, 1995), h.90

koordinasi yang lebih baik dan menjamin terlaksananya pemberdayaan masyarakat yang lebih efektif dibawah Gubernur, Bupati, Walikota yakni Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM).²³

Pembangunan ekonomi harus dilakukan atas kebutuhan yang paling dirasakan masyarakat, selain itu dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di pedesaan, maka prinsip-prinsip yang harus di perhatikan adalah:²⁴

- a. Prinsip kebutuhan adalah program pembangunan masyarakat pedesaan terutama didasarkan atas untuk memenuhi kebutuhan yang dinyatakan dan dirasakan masyarakat.
- b. Prinsip partisipasi merupakan menekankan pada keterlibatan masyarakat secara aktif dan lembaga yang mempunyai fungsi pelayanan masyarakat didalam perencanaan, pengorganisasian, pembinaan, penilaian dan pembangunan.
- c. Prinsip keterpaduan mencerminkan adanya upaya untuk memadukan sumber-sumber yang dimiliki masyarakat dan lembaga terkait dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan masyarakat.
- d. Prinsip keberlanjutan menegaskan bahwa pembangunan masyarakat yang tidak dilakukan sekali tuntas melainkan secara bertahap, terus-menerus dan terarah untuk mencapai kondisi yang lebih baik.

²³ AyipMuflich, “Masalah dan Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat dalam Mendukung Ketahanan Pangan”. (Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (DEPDAGRI), 2006

²⁴ Tjahya Supriatna, *Strategi Pembangunan dan Kemiskinan*, (Jakarta: Rineta Cipta, 2000), h. 79-81

6. Pemberdayaan Masyarakat Melalui PNPM Mandiri

a. Pengertian Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan

Untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, pemerintah meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri mulai tahun 2007. Melalui PNPM Mandiri dirumuskan kembali mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin, dapat ditumbuhkembangkan sehingga mereka bukan sebagai obyek melainkan subyek upaya penanggulangan kemiskinan.

Pelaksanaan PNPM Mandiri tahun 2007 dimulai dengan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) sebagai dasar pengembangan pemberdayaan masyarakat di perdesaan beserta program pendukungnya seperti PNPM Generasi; Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) sebagai dasar bagi pengembangan pemberdayaan masyarakat di perkotaan; dan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) untuk pengembangan daerah tertinggal, pasca bencana, dan konflik. Mulai tahun 2008 PNPM Mandiri diperluas dengan melibatkan Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) untuk mengintegrasikan

pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan daerahsekitarnya. PNPM Mandiri diperkuat dengan berbagai program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh berbagai departemen/sektor dan pemerintah daerah. Pelaksanaan PNPM Mandiri 2008 juga akan diprioritaskan pada desa-desa tertinggal.²⁵

Visi PNPM Mandiri Perdesaan adalah mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin di perdesaan. Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kemandirian berarti mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada di lingkungannya, mampu mengakses sumber daya di luar lingkungannya, serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan. Misi PNPM Mandiri:²⁶

- 1) Meningkatkan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya.
- 2) Pelembagaan sistem pembangunan partisipatif.
- 3) Mengoptimalkan fungsi dan peran pemerintah lokal.
- 4) Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana dasar masyarakat.
- 5) Pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan.

Dalam rangka mencapai visi dan misi PNPM Mandiri Perdesaan, strategi yang dikembangkan PNPM Mandiri Perdesaan yaitu menjadikan rumah tangga miskin (RTM) sebagai kelompok sasaran, menguatkan sistem pembangunan partisipatif, serta mengembangkan

²⁵Pedoman Umum PNPM Mandiri

²⁶.Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan

kelembagaan kerja sama antar desa. Berdasarkan visi, misi, dan strategi yang dikembangkan, maka PNPM Mandiri Perdesaan lebih menekankan pentingnya pemberdayaan sebagai pendekatan yang dipilih. Melalui PNPM Mandiri Perdesaan diharapkan masyarakat dapat menuntaskan tahapan pemberdayaan yaitu tercapainya kemandirian dan keberlanjutan, setelah tahapan pembelajaran dilakukan melalui Program Pengembangan Kecamatan (PPK).

PNPM Mandiri merupakan program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Program ini berupaya untuk menciptakan atau meningkatkan kualitas masyarakat, baik secara individu maupun kelompok dalam memecahkan berbagai persoalan terkait pada upaya untuk meningkatkan kualitas kehidupan, kemandirian dan kesejahteraan.²⁷ Pelaksanaan PNPM mandiri tahun 2007 dimulai dengan dua program pemberdayaan masyarakat, yaitu Program Pengembangan Kecamatan (PPK) sebagai dasar pemberdayaan masyarakat di perdesaan, dan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) sebagai dasar bagi pengembangan pemberdayaan masyarakat di perkotaan, pelaksanaan PNPM Mandiri cakupan pembangunan diharapkan dapat diperluas hingga ke daerah-daerah terpencil dan terisolir. Sebagai program pemberdayaan masyarakat terbesar di Indonesia ini mulai memusatkan kegiatannya di wilayah perdesaan yakni PNPM Mandiri Perdesaan.

²⁷Pedoman Pelaksanaan Strategi Komunikasi PNPM Mandiri, 2008

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, dengan melibatkan koordinasi Bank Indonesia melalui program keuangan mikro bersama Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) serta bekerja sama dengan lembaga-lembaga keuangan milik masyarakat seperti Lembaga Dana dan Kredit Perdesaan (LDKP) dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Pengertian yang terkandung mengenai PNPM Mandiri:

1) PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan, dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.

2) Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang lebih besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai.

b. Tujuan PNPM Mandiri

Tujuan umum PNPM Mandiri yaitu meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri. Tujuan khususnya yaitu:²⁸

- 1) Meningkatnya partisipasi seluruh masyarakat, termasuk masyarakat miskin, kelompok perempuan, komunitas adat terpencil, dan kelompok masyarakat lainnya yang rentan dan sering terpinggirkan ke dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.
- 2) Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat yang mengakar, representatif, dan akuntabel.
- 3) Meningkatnya kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin melalui kebijakan, program dan anggaran yang berpihak pada masyarakat miskin (*pro-poor*).
- 4) Meningkatnya sinergi masyarakat, pemerintah daerah, swasta, asosiasi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, dan kelompok peduli lainnya, untuk mengefektifkan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan.
- 5) Meningkatnya keberdayaan dan kemandirian masyarakat, serta kapasitas pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat dalam menanggulangi kemiskinan di wilayahnya.

²⁸Pedoman Umum PNPM Mandiri, *Op.cit.* h.11

- 6) Meningkatnya modal sosial masyarakat yang berkembang sesuai dengan potensisosial dan budaya serta untuk melestarikan kearifan lokal.
- 7) Meningkatnya inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna, informasi dankomunikasi dalam pemberdayaan masyarakat.

c. Keluaran Program

- 1) Terjadinya peningkatan keterlibatan Rumahtangga Miskin (RTM) dan kelompokperempuan mulai perencanaan sampai dengan pelestarian.
- 2) Terlembaganya sistem pembangunan partisipatif di desa dan antar desa.
- 3) Terjadinya peningkatan kapasitas pemerintahan desa dalam memfasilitasipembangunan partisipatif.
- 4) Berfungsi dan bermanfaatnya hasil kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan bagimasyarakat.
- 5) Terlembaganya pengelolaan dana bergulir dalam peningkatan pelayanan sosialdasar dan ketersediaan akses ekonomi terhadap RTM.
- 6) Terbentuk dan berkembangnya BKAD dalam pengelolaan pembangunan.
- 7) Terjadinya peningkatan peran serta dan kerja sama para pemangku kepentingandalam upaya penanggulangan kemiskinan perdesaan.

d. Prinsip Dasar PNPM Mandiri Perdesaan

Sesuai dengan Pedoman Umum, PNPM Mandiri Perdesaan mempunyai prinsip atau nilai-nilai dasar yang selalu menjadi landasan atau acuan dalam setiap pengambilan keputusan maupun tindakan yang akan diambil dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan. Nilai-nilai dasar tersebut diyakini mampu mendorong terwujudnya tujuan PNPM Mandiri Perdesaan. Prinsip-prinsip itu meliputi:

- 1) Bertumpu pada pembangunan manusia. Pengertian prinsip bertumpu pada pembangunan manusia adalah masyarakat hendaknya memilih kegiatan yang berdampak langsung terhadap upaya pembangunan manusia daripada pembangunan fisik semata
- 2) Otonomi. Pengertian prinsip otonomi adalah masyarakat memiliki hak dan kewenangan mengatur diri secara mandiri dan bertanggung jawab, tanpa intervensi negatif dari luar
- 3) Desentralisasi. Pengertian prinsip desentralisasi adalah memberikan ruang yang lebih luas kepada masyarakat untuk mengelola kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan yang bersumber dari pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kapasitas masyarakat
- 4) Berorientasi pada masyarakat miskin. Pengertian prinsip berorientasi pada masyarakat miskin adalah segala keputusan yang diambil berpihak kepada masyarakat miskin

- 5) Partisipasi. Pengertian prinsip partisipasi adalah masyarakat berperan secara aktif dalam proses atau alur tahapan program dan pengawasannya, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan dengan memberikan sumbangan tenaga, pikiran, atau dalam bentuk materi
- 6) Keadilan dan kesetaraan gender. Pengertian prinsip kesetaraan dan keadilan gender adalah masyarakat baik laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahapan program dan dalam menikmati manfaat kegiatan pembangunan, kesetaraan juga dalam pengertian kesejajaran kedudukan pada saat situasi konflik
- 7) Demokratis. Pengertian prinsip demokratis adalah masyarakat mengambil keputusan pembangunan secara musyawarah dan mufakat
- 8) Transparansi dan Akuntabel. Pengertian prinsip transparansi dan akuntabel adalah masyarakat memiliki akses terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal, maupun administratif
- 9) Prioritas. Pengertian prinsip prioritas adalah masyarakat memilih kegiatan yang diutamakan dengan mempertimbangkan kemendesakan dan kemanfaatan untuk pengentasan kemiskinan

10) Keberlanjutan. Pengertian prinsip keberlanjutan adalah bahwa dalam setiap pengambilan keputusan atau tindakan pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemeliharaan kegiatan harus telah mempertimbangkan sistem pelestariannya.

11) Sederhana. Semua aturan, mekanisme dan prosedur dalam pelaksanaan PNPM Mandiri harus sederhana, fleksibel, mudah dipahami, dan mudah dikelola, serta dapat dipertanggungjawabkan oleh masyarakat.

7. Dasar Hukum PNPM Mandiri

Dasar hukum pelaksanaan PNPM Mandiri mengacu pada landasan konstitusional UUD 1945 beserta amandemennya, landasan idiil Pancasila, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta landasan khusus pelaksanaan PNPM Mandiri yang akan disusun kemudian. Peraturan perundang-undangan khususnya terkait sistem pemerintahan, perencanaan, keuangan negara, dan kebijakan penanggulangan kemiskinan adalah sebagai berikut:

a. Sistem Pemerintahan

Dasar peraturan perundangan sistem pemerintahan yang digunakan adalah:

1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintah Desa.

3) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan.

4) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.

b. Sistem Perencanaan

Dasar peraturan perundangan sistem perencanaan terkait adalah:

1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).

2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.

3) Peraturan Presiden Nomor. 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2004-2009.

4) Peraturan Pemerintah Nomor. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

5) Peraturan Pemerintah Nomor. 40 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.

6) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

c. Sistem Keuangan Negara

Dasar peraturan perundangan sistem keuangan negara adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4455);
- 3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4597);
- 6) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/jasa Pemerintah;
- 7) Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor.005/MPPN/06/2006 tentang Tatacara Perencanaan dan

Pengajuan Usulan serta Penilaian Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri;

8) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2006 tentang Tata Cara Pemberian Hibah kepada Daerah;

9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

8. Kategori Program

Program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat dapat dikategorikan sebagai berikut:²⁹

a. PNPM-Inti: terdiri dari program/kegiatan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan, yang mencakup PPK, P2KP, PISEW, dan P2DTK.

b. PNPM-Penguatan: terdiri dari program-program pemberdayaan masyarakat berbasis sektoral, kewilayahan, serta khusus untuk mendukung penanggulangan kemiskinan yang pelaksanaannya terkait pencapaian target tertentu. Pelaksanaan program-program ini di tingkat komunitas mengacu pada kerangka kebijakan PNPM Mandiri.

9. Komponen Program

Rangkaian proses pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui komponen program sebagai berikut:

²⁹*Ibid*, h.16

a. Pengembangan Masyarakat

Komponen pengembangan masyarakat mencakup serangkaian kegiatan untuk membangun kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat yang terdiri dari pemetaan potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat, perencanaan partisipatif, pengorganisasian, pemanfaatan sumberdaya, pemantauan, dan pemeliharaan hasil-hasil yang telah dicapai.

Untuk mendukung rangkaian kegiatan tersebut, disediakan dana pendukung kegiatan pembelajaran masyarakat, pengembangan relawan, dan operasional pendampingan masyarakat; dan fasilitator, pengembangan kapasitas, mediasi dan advokasi. Peran fasilitator terutama pada saat awal pemberdayaan, sedangkan relawan masyarakat adalah yang utama sebagai motor penggerak masyarakat di wilayahnya.

b. Bantuan Langsung Masyarakat

Komponen Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) adalah dana stimulan keswadayaan yang diberikan kepada kelompok masyarakat untuk membiayai sebagian kegiatan yang direncanakan oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, terutama masyarakat miskin.

c. Peningkatan Kapasitas Pemerintahan dan Pelaku Lokal

Komponen peningkatan kapasitas pemerintahan dan pelaku lokal adalah serangkaian kegiatan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan pelaku lokal/kelompok peduli lainnya agar mampu menciptakan kondisi yang kondusif dan sinergi yang positif bagi masyarakat

terutama kelompok miskin dalam menyelenggarakan hidupnya secara layak. Kegiatan terkait dalam komponen ini antara lain seminar, pelatihan, lokakarya, kunjungan lapangan yang dilakukan secara selektif, dan sebagainya.

d. Bantuan Pengelolaan dan Pengembangan Program

Komponen bantuan pengelolaan dan pengembangan program meliputi kegiatan-kegiatan untuk mendukung pemerintah dan berbagai kelompok peduli lainnya dalam pengelolaan kegiatan seperti penyediaan konsultan manajemen, pengendalian mutu, evaluasi, dan pengembangan program.

10. Pendanaan PNPM Mandiri Perdesaan

Pendanaan PNPM Mandiri Perdesaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan sumber-sumber pendanaan yang lain. Pendanaan tersebut dilakukan melalui proses pencairan dan penyaluran dana.

Pada prinsipnya, semua proses terkait dengan penyaluran dan pencairan dana PNPM Mandiri Perdesaan di kecamatan dikelola dan diadministrasikan oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK), sedangkan kegiatan pengelolaan dan pengadministrasian di desa dilaksanakan oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK).

Administrasi yang dimaksud adalah administrasi kegiatan yang dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan, dan pengendalian kegiatan serta administrasi keuangan dan pelaporan.

a. Pencairan Dana PNPM Mandiri Perdesaan

Pencairan dana PNPM Mandiri Perdesaan adalah aliran dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) kecamatan yang bersumber dari APBD melalui Kantor Kas Daerah setempat dan APBN melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) ke kecamatan.

1) Sumber Dana BLM PNPM Mandiri Perdesaan

PNPM Mandiri Perdesaan merupakan program Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Daerah. Artinya, program ini direncanakan, dilaksanakan, dan didanai bersama-sama berdasarkan persetujuan dan kemampuan yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan Daerah.

Sumber dana berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
- c. Swadaya masyarakat
- d. Partisipasi dunia usaha

2) Mekanisme Pencairan Dana BLM PNPM Mandiri Perdesaan

Pencairan dana BLM dari APBN dilakukan melalui KPPN ke rekening kolektif yang ada di UPK dengan nama "Rekening Bantuan PNPM Mandiri Perdesaan" pada bank pemerintah, termasuk bank pemerintah daerah yang ada atau terdekat dengan lokasi kecamatan sesuai keputusan masyarakat. Tata cara dan dokumen yang harus disiapkan dalam proses pencairan dana BLM yang bersumber dari APBN akan diatur secara tersendiri melalui

petunjuk teknis pencairan dana dan peraturan lain yang diterbitkan oleh Pemerintah.

Adapun pencairan dana BLM yang bersumber dari APBD dilakukan melalui Kantor Kas Daerah setempat ke rekening kolektif yang ada di UPK dengan nama “Rekening Bantuan PNPM Mandiri Perdesaan” pada bank pemerintah, termasuk bank pemerintah daerah yang ada atau terdekat dari lokasi kecamatan sesuai keputusan masyarakat.

Tim Fasilitator Kabupaten harus memastikan ketersediaan dana tersebut dan ikut memfasilitasi proses pencairannya hingga masuk ke rekening UPK. Nilai BLM yang akan dicairkan dari Kantor Kas Daerah selanjutnya dicantumkan dalam Surat Perjanjian Pendanaan (SP2). Total dana yang akan dicairkan dari Kantor Kas Daerah adalah total nilai sesuai ketentuan yang akan digunakan untuk membiayai usulan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Surat Penetapan Camat (SPC) di luar beban pajak daerah. Rekening Bantuan PNPM Mandiri Perdesaan dapat berupa rekening giro ataupun rekening tabungan. Rekening tersebut dibuka dengan spesimen tanda tangan: (1) Ketua UPK/UPKS, (2) Dua orang Fasilitator Kecamatan yang bertugas, yaitu Fasilitator Kecamatan Pemberdayaan dan Fasilitator Kecamatan Teknik, dan (3) Salah satu wakil masyarakat yang telah ditetapkan dalam Musyawarah Antar Desa (MAD). Pada setiap pergantian personel dari ketiga

pihak tersebut, harus dilakukan penggantian spesimen tanda tangan. Apabila terjadi pergantian Fasilitator Kecamatan dalam satu kabupaten, sambil menunggu penetapan, dapat dilakukan penggantian spesimen sementara dengan mengalihkannya kepada Fasilitator Kabupaten.

b. Penyaluran Dana PNPM Mandiri Perdesaan

Penyaluran dana PNPM Mandiri Perdesaan adalah aliran dana PNPM Mandiri Perdesaan dari rekening kolektif di UPK ke desa melalui Tim Pengelola Kegiatan (TPK) sesuai dengan rencana kegiatan dan kebutuhan dalam jangka waktu tertentu. Mekanisme Penyaluran Dana PNPM Mandiri Perdesaan

- 1) Sebelum dilakukan penyaluran dana ke desa dibuat Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) antara UPK dan TPK yang diketahui oleh camat dan tiap-tiap kepala desa. SPPB memuat jenis-jenis kegiatan yang akan dilaksanakan, dengan melampirkan dokumen perencanaan dan dokumen yang berdasarkan jenis kegiatan yang akan didanai
- 2) Penyaluran dana dari UPK ke TPK dilakukan sesuai kebutuhan dan jadwal pelaksanaan kegiatan desa yang dituangkan dalam Rencana Penggunaan Dana (RPD). RPD disiapkan oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (KPMD) dan TPK masing-masing desa untuk selanjutnya diverifikasi oleh UPK dan Fasilitator Kecamatan di kecamatan.

- 3) Proses pembayaran kepada supplier (pemasok) yang telah disepakati dan dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) antara TPK dengan pemasok harus dilakukan melalui transfer langsung dari UPK kepada pemasok.
- 4) Pada setiap pengajuan penyaluran dana tahap berikutnya, TPK harus menyampaikan Laporan Penggunaan Dana (LPD) dari RPD sebelumnya disertai dengan bukti-bukti pertanggungjawaban.
- 5) Sebelum penyaluran dana terakhir, TPK dan KPMD membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan (SPKMP) yang ditandatangani oleh TPK dan KPMD.
- 6) Setelah kegiatan selesai 100 persen dan sebelum dilaksanakan Musyawarah Desa Serah Terima (MDST) di MD 5, terlebih dahulu harus dilakukan sertifikasi kegiatan prasarana dan nonprasarana oleh Fasilitator Kecamatan terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan. Dokumen-dokumen pencairan dan penggunaan dana harus sudah lengkap, diisi dengan benar sesuai dengan fakta penggunaannya.
- 7) Pada saat MD 5, dilakukan serah terima kegiatan termasuk seluruh administrasi dan pelaporannya serta dokumen pendukung, di antaranya buku rekening Bantuan PNPM TPK “...” dan lain-lain dari pengurus TPK kepada Kepala Desa atas nama masyarakat desa setempat. Dokumen asli diarsip di kantor desa dengan salinan diarsip di kantor UPK.

8) Penyaluran dana untuk kegiatan multiyears (selanjutnya disebut tahun jamak), dilakukan dari rekening kolektif UPK ke TPK untuk secara langsung disalurkan ke rekening Pokja. Dari rekening Pokja, dana tidak langsung diberikan sekaligus kepada pemanfaat, tetapi diberikan secara rutin sesuai kebutuhan dan jadwal kegiatan. Dana tahun jamak diberikan paling lama untuk 2 tahun anggaran.

9) Penyaluran dana untuk paket kegiatan antardesa dilakukan dengan membentuk Tim Pelaksana Kegiatan AntarDesa (TPKAD), dengan susunan tim meliputi Ketua, Sekretaris, dan Bendahara yang berasal dari desa-desa yang melakukan kerja sama dengan cara melakukan musyawarah untuk menyepakati susunan Tim TPKAD. Selanjutnya, proses penyaluran dana dilakukan dari UPK kepada TPKAD.

10) Spesimen rekening Pokja adalah (1) salah satu pengurus Pokja (2) Ketua TPK, (3) satu wakil pemanfaat (4) Ketua UPK.

11. Pengelolaan Dana Bergulir

Pengertian dana bergulir dalam penjelasan ini adalah dana yang berasal dari dana BLM Program (PPK, PNPM-PPK, PNPM Mandiri Perdesaan) yang telah dikembalikan ke UPK sebagai pengelolaan dan digulirkan kembali ke masyarakat. Dengan berbagai penguatan perangkat/ instrumen pengelolaan dan model pendampingan dalam program memberikan dampak yang menunjukkan hasil pengelolaan dana bergulir yang transparan dan mempunyai akuntabilitas.

Pada beberapa lokasi UPK telah dipercaya sebagai penyalur dan pengelola dana microfinance dari pemerintah, pemerintah daerah maupun dunia usaha dengan pedoman yang sesuai dengan ketentuan pemerintah daerah atau dunia usaha tersebut, sehingga dalam mendukung pengembangan UPK memerlukan panduan yang sesuai dengan program (PPK, PNPM-PPK, dan PNPM Mandiri Perdesaan) agar pelestarian program dilakukan secara berkelanjutan sesuai dengan tujuan.

Kegiatan pengelolaan dana bergulir PNPM Mandiri Perdesaan bertujuan:

- a. Memberikan kemudahan akses permodalan usaha baik kepada masyarakat sebagai pemanfaatan maupun kelompok usaha.
- b. Pelestarian dan pengembangan permodalan usaha yang berasal dari dana program sebelumnya yang sesuai dengan tujuan program sebelumnya.
- c. Peningkatan kapasitas pengelola kegiatan dana bergulir di tingkat wilayah pedesaan.
- d. Menyiapkan kelembagaan UPK sebagai pengelola dana bergulir yang mengacu pada tujuan program secara akuntabel, transparan dan berkelanjutan.
- e. Peningkatan pelayanan kepada RTM dalam pemenuhan kebutuhan permodalan usaha melalui kelompok pemanfaat.

Adapun sasaran jenis kelompok dalam kegiatan dana bergulir PNPM – Mandiri Perdesaan adalah:

- a. Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP): adalah kelompok yang mempunyai kegiatan pengelolaan simpanan dan pinjaman dengan prioritas kelompok yang mempunyai anggota RTM;
- b. Kelompok Usaha Bersama: adalah kelompok yang mempunyai usaha yang dikelola secara bersama oleh anggota kelompok dengan kelompok yang mempunyai anggota RTM;
- c. Kelompok Aneka Usaha: adalah kelompok yang anggotanya Rumah Tangga Miskin yang mempunyai usaha yang dikelola secara individual oleh anggota.

C. Tinjauan Tentang Pinjaman

1. Pengertian Pinjaman

Menurut Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, pinjaman atau kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.³⁰ Sedangkan menurut *Madzhab Hanbali*, pinjaman adalah pembayaran uang keseseorang siapa yang akan memperoleh manfaat dengan itu dan kembalikan sesuai dengan pendanaannya. Pinjaman diartikan juga, memindahkan kepemilikan sesuatu kepada seseorang dan dia perlu membayar kembali kepadanya.³¹

³⁰ Kasmir, *Kewirausahaan*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2010). h. 96.

³¹ Amir Machmud Rukmana, *Bank Syariah, Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*, (Jakarta, 2010), ed. 1 cet. 1, h. 15

Pinjaman yang dibahas yaitu pinjaman PNPM Mandiri Perdesaan yang mana dapat diartikan sebagai pinjaman modal. Pinjaman modal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah uang yang dipakai sebagai pokok untuk berdagang, melepas uang barang dan sebagainya yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan dan diinterpretasikan sebagai sejumlah uang yang digunakan dalam menjalankan kegiatan-kegiatan bisnis. Pinjaman modal dalam bentuk uang diperlukan untuk membiayai segala keperluan usaha. Dan harus ada keahlian dan kemampuan seseorang untuk mengelola dan menjalankan suatu usaha. Modal pertama kali yang dikeluarkan digunakan untuk membiayai pendirian perusahaan. Mulai dari persiapan yang diperlukan sampai perusahaan tersebut berdiri. Disamping itu, pinjaman modal juga diperlukan untuk membiayai oprasi usaha pada saat bisnis tersebut dijalankan. Besarnya modal yang diperlukan tergantung dari jenis usaha yang akan digarap, mulai dari usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar. Jadi jenis usaha menentukan besarnya jumlah modal yang diperlukan.³²

2. Jenis-jenis Pinjaman Modal

a. Pinjaman Modal Asing

Pinjaman modal asing adalah modal yang biasanya diperoleh dari pihak luar perusahaan dan biasanya diperoleh dari pinjaman. Penggunaan modal pinjaman untuk membiayai suatu usaha akan

³²Abdul Ghofur Anshori, *Perjanjian Islam Dalam Indonesia, Konsep Gegulasi, dan Implementasi*, (Yogyakarta, 2010), ed.1 cet. 2. h. 181

menimbulkan beban biaya bunga, biaya administrasi, serta biaya provisi dan komisi yang besarnya relatif. Penggunaan modal pinjaman mewajibkan pengembalian pinjaman setelah jangka waktu tertentu. Keuntungan pinjaman modal adalah jumlahnya yang tidak terbatas, artinya tersedia dalam jumlah banyak. Dengan menggunakan modal pinjaman biasanya timbul motivasi dari pihak manajemen untuk mengerjakan usaha dengan sungguh-sungguh.

Sumber dana dari modal asing dapat diperoleh dari:

- 1) Pinjaman dari dunia perbankan, baik dari perbankan swasta, pemerintah, maupun perbankan asing.
- 2) Pinjaman dari lembaga keuangan seperti perusahaan pegadaian, modal ventura, asuransi, leasing, dana pensiun, koperasi, atau lembaga pembiayaan lainnya.
- 3) Pinjaman dari perusahaan non keuangan.³³

b. Modal Sendiri

Modal sendiri adalah modal yang diperoleh dari pemilik perusahaan dengan cara mengeluarkan saham. Saham yang dikeluarkan perusahaan dapat dilakukan secara tertutup atau terbuka. Keuntungan menggunakan modal sendiri untuk membiayai suatu usaha adalah tidak adanya beban biaya bunga, tetapi hanya akan membayar deviden. Pembayaran deviden dilakukan apabila perusahaan memperoleh keuntungan dan besarnya deviden tergantung dari keuntungan perusahaan. Lalu tidak

³³Kasmir, *Kewirausahaan*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2013), Edisi Revisi cet. 8, h. 95-96

adanya kewajiban untuk mengembalikan modal yang telah digunakan. Kerugian menggunakan modal sendiri adalah jumlahnya sangat terbatas dan relatif sulit untuk memperolehnya.

D. Pendapatan

1. Pengertian Pendapatan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendapatan adalah hasil kerja (usaha atau sebagainya). Sedangkan pendapatan dalam kamus manajemen adalah uang yang diterima oleh perorangan, perusahaan dan organisasi lain dalam bentuk upah, gaji, sewa, bunga, komisi, ongkos dan laba.³⁴ Dalam al-Qur'an surat An-Nisa' (4) ayat 29, tersirat tentang pendapatan.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ
تِّجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S An-Nisa' (4): 29)

Pendapatan seseorang juga dapat didefinisikan sebagai banyaknya penerimaan yang dinilai dengan satuan mata uang yang dapat dihasilkan seseorang atau suatu bangsa dalam periode tertentu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendapatan adalah sebagai jumlah penghasilan

³⁴BN. Marbun, *Kamus Manajemen*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003), h. 230

yang diterima oleh para anggota masyarakat untuk jangka waktu tertentu sebagai balas jasa atau faktor-faktor produksi yang telah disumbangkan.³⁵

Tingkat pendapatan merupakan salah satu kriteria maju tidaknya suatu daerah. Bila pendapatan suatu daerah relatif rendah, dapat dikatakan bahwa kemajuan dan kesejahteraan tersebut akan rendah pula. Sebaliknya, bila pendapatan masyarakat suatu daerah relatif tinggi, maka tingkat kesejahteraan dan kemajuan daerah tersebut tinggi pula.³⁶ Pengalaman ber-Usaha juga mempengaruhi pendapatan. Semakin baiknya pengalaman ber-Usaha seseorang maka semakin berpeluang dalam meningkatkan pendapatan. Usaha meningkatkan pendapatan masyarakat dapat dilakukan dengan pemberantasan kemiskinan yaitu membina kelompok masyarakat dapat dikembangkan dengan pemenuhan modal kerja, ketepatan dalam penggunaan modal kerja diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan usaha sesuai dengan yang diharapkan sehingga upaya peningkatan pendapatan masyarakat dapat terwujud dengan optimal.

2. Macam-macam Pendapatan

Menurut Mulyanto dan Sumardi dan Hans Dieter Evers, pendapatan dapat digolongkan menjadi:³⁷

- a. Pendapatan berupa uang, adalah semua penghasilan berupa uang yang sifatnya regular dan diterima sebagai balas jasa atau kontraprestasi.

³⁵Reksoprayitno, *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, (Jakarta: Bina Grafika, 2004), h. 79

³⁶Mahyu Danil, "Pengaruh Pendapatan Terhadap Tingkat Konsumsi pada Pegawai Negeri Sipil di Kantor Bupati Kabupaten Bireuen", *Journal Ekonomika Universitas Almuslim Bireuen Aceh*, Vol. IV No.7:9

³⁷Hartono Widodo, *PAS (Pedoman Akuntansi Syari'ah)*, (Panduan Praktis Operasional BMT), (Bandung: Mizan, 2000), h. 64

- b. Pendapatan berupa barang, adalah semua pendapatan yang sifatnya regular dan diterima dalam bentuk barang.
- c. Lain-lain penerimaan uang dan barang. Penerimaan ini misalnya penjualan barang-barang yang dipakai, pinjaman uang hasil undian, warisan, penagihan piutang dan lain-lain.

3. Pembagian Pendapatan

- a. Pendapatan pokok, yaitu pendapatan yang tiap bulan diharapkan diterima, pendapatan ini diperoleh dari pekerjaan utama yang bersifat rutin.
- b. Pendapatan sampingan, yaitu pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan di luar pekerjaan pokok, maka tidak semua orang mempunyai pendapatan sampingan.
- c. Pendapatan lain-lain, yaitu pendapatan yang berasal dari pemberian pihak lain, baik bentuk barang maupun bentuk uang, pendapatannya bukan dari usaha.³⁸

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan yaitu:³⁹

- a. Kesempatan kerja yang tersedia

Semakin banyak kesempatan kerja yang tersedia berarti semakin banyak penghasilan yang bisa diperoleh dari hasil kerja tersebut.

³⁸Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2007) cet. 4, h. 68

³⁹Hartono, *Op.Cit*, h. 64

b. Kecakapan dan keahlian

Dengan bekal kecakapan dan keahlian yang tinggi akan dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas yang pada akhirnya berpengaruh pula terhadap penghasilan.

c. Motivasi

Motivasi atau dorongan juga mempengaruhi jumlah penghasilan yang diperoleh, semakin besar dorongan seseorang untuk melakukan pekerjaan, semakin besar pula penghasilan yang diperoleh.

d. Keuletan bekerja

Keuletan dapat disamakan dengan ketekunan, keberanian untuk menghadapi segala macam tantangan. Bila saat menghadapi kegagalan tersebut dijadikan sebagai bekal untuk meniti ke arah kesuksesan dan keberhasilan.

e. Banyak sedikitnya modal yang digunakan

Besar kecilnya usaha yang dilakukan seseorang sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya modal yang dipergunakan. Suatu usaha yang besar akan dapat memberikan peluang yang besar pula terhadap pendapatan yang akan diperoleh.

f. Modal atau Capital dalam pengertian ekonomi umum mencakup benda-

benda seperti tanah, gedung-gedung, mesin-mesin, alat perkakas, dan barang produktif lainnya untuk suatu kegiatan usaha.

E. Tinjauan Pinjaman Dalam Islam

1. Hutang Piutang (*Qardh*)

Hutang piutang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu uang yang dipinjamkan dari orang lain.⁴⁰ Sedangkan piutang mempunyai arti uang yang dipinjamkan (dapat ditagih dari orang lain).⁴¹ Secara umum hutang-piutang ialah memberi sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan mengembalikan sama dengan yang itu (sama nilainya). Hutang-piutang adalah salah satu bentuk transaksi yang bisa dilakukan pada seluruh tingkat masyarakat baik masyarakat tradisional maupun modern, oleh sebab itu transaksi itu sudah ada dan dikenal oleh manusia sejak manusia ada di bumi ini ketika mereka mulai berhubungan satu sama lain. Setiap perbuatan yang mengacu pada perniagaan tentunya melalui proses awal yaitu akad, sebelum terjadiya perikatan antara pihak satu dengan pihak yang lain. Akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih, berdasarkan keridhoan masing-masing.⁴²

Dalam Islam, khususnya lembaga keuangan syariah, transaksi hutang piutang tersebut disebut dengan *Qardh*. *Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat di tagih atau di minta kembali.⁴³ Sedangkan *Qardh* menurut *syara'* adalah harta yang diberikan oleh kreditur (pemberi utang) kepada debitur (pemilik utang), agar debitur mengembalikan yang

⁴⁰ Poerwadarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h.1136

⁴¹ *Ibid*, h.760

⁴² Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 37

⁴³ Muhammad Nur Rianto, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h.186

serupa dengannya kepada kreditur ketika telah mampu.⁴⁴ *Qardh* juga diartikan utang-piutang atau menghutangkan barang dan dibayar dengan barang pula, dan di sukai agama.⁴⁵

Konsep pinjam meminjam dalam Islam adalah semata-mata amal kebajikan diantara golongan mampu dengan yang tidak mampu supaya terjalin hubungan *muhibah* dan saling membantu antara kedua golongan itu karena tujuan dari peminjaman itu adalah pertolongan dan bantuan kepada orang yang memerlukan dan Islam tidak membolehkan seseorang yang memberi pinjaman itu menjadikan pinjaman yang diberikan itu sebagai satu sumber keuntungan bagi dirinya. Karena itulah orang yang memberi pinjaman itu diberi ganjaran pahala sama dengan pahala orang yang bersedekah.⁴⁶

2. Dasar Hukum *Qardh*

a. Dalam Al-Qur'an

Firman Allah QS. Al-Baqarah (2):245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَمْضَاعًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ

وَيَبْضُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan. (QS. Al-Baqarah (2): 245)

⁴⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 4*, (Jakarta: Cempaka Putih Tengah, 2009), h. 115

⁴⁵ Teuku Muhammad Hasbi ash Shieddieqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 363

⁴⁶ Veithzal Rivai & Arfian Arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2010), h.406

Firman Allah, QS. Al-Hadiid (57):11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.(QS. Al-Hadiid (57):11)

Firman Allah, QS. At-Taghabun (64): 17

إِنْ تَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضْعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ﴿١٧﴾

Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipat gandakan balasannya kepadamu dan mengampuni kamu. dan Allah Maha pembalas Jasa lagi Maha Penyantun. (QS. At-Taghabun (64): 17)

Ayat-ayat tersebut pada dasarnya berisi anjuran untuk melakukan perbuatan *Qardh* (memberikan utang) kepada orang lain, dan imbalannya adalah akan dilipatgandakan oleh Allah. Dari sisi *muqridh* (orang yang memberikan utang), Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan dengan cara memberi utang. Dari sisi *muqtaridh*, utang bukan perbuatan yang dilarang, melainkan dibolehkan karena seseorang berutang dengan tujuan untuk memanfaatkan barang atau uang yang diutangnya itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan ia akan mengembalikannya persis seperti yang diterimanya.⁴⁷

b. Dalam Hadits

Qardh merupakan salah satu bentuk *taqarrub* kepada Allah SWT., karena *Qardh* berarti berlemah-lembut dan mengasihi sesama manusia,

⁴⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h.274-275

memberikan kemudahan dan solusi dari duka dan kesulitan yang menimpa orang lain. Islam menganjurkan dan menyukai orang yang meminjamkan (*Qardh*), dan membolehkan bagi orang yang diberikan *Qardh*, serta tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang makruh, karena dia menerima harta untuk dimanfaatkan dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya, dan peminjam tersebut mengembalikan harta seperti semula.⁴⁸

Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ
وَمَنْ يَسِّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ
فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

Barangsiapa meringankan sebuah kesusahan (kesedihan) seorang mukmin di dunia, Allah akan meringankan kesusahannya pada hari kiamat. Barangsiapa memudahkan urusan seseorang yang dalam keadaan sulit, Allah akan memberinya kemudahan di dunia dan akhirat. Barangsiapa menutup 'aib seseorang, Allah pun akan menutupi 'aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan senantiasa menolong hamba-Nya, selama hamba tersebut menolong saudaranya. (HR. Muslim no. 2699)⁴⁹

Ibnu Mas'ud memberitakan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

Tiada seorang Muslim pun yang memberikan pinjaman kepada Muslim (lainnya) dua kali, melainkan nilainya seperti shadaqah sekali. (H.R. Ibnu Majah)⁵⁰

Diungkapkan oleh Umamah, bahwa Nabi SAW bersabda:

⁴⁸Sayyid Sabiq, *Op.Cit.*, h. 181

⁴⁹*Ibid*

⁵⁰*Ibid*

رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِ يَبْعُ بِأَبِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا الصَّدَقَةُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا. وَالْقَرْضُ مِائَتَانِ عَشْرَ .
فَقُلْتُ يَا جِبْرِيلُ مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ؟ قَالَ لَا نَالُ السَّائِلِ يَسْأَلُو عِنْدَهُ .
وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ . (رواه ابن ماجه)

Aku melihat ketika sedang melaksanakan isro' pada pintu surga tertulis sodaqoh itu pahalanya sepuluh hasanah sedangkan memberi hutangan pahalanya 18 hasanah maka saya berkata kepada Jibril "Kenapa memberi hutangan lebih utama dari sodaqoh? maka Jibril menjawab "Karena biasanya orang yang minta minta itu dia masih mempunyai sesuatu untuk menutupi kebutuhannya adapun orang yang berhutang dia tidak berhutang kecuali karena sangat membutuhkannya." (HR. Ibnu Majah)⁵¹

Dari hadits-hadits tersebut dapat dipahami bahwa *Qardh* (utang atau pinjaman) merupakan perbuatan yang dianjurkan, yang akan diberi imbalan oleh Allah SWT. dan termasuk kebaikan apabila pihak peminjam memberikan tambahan terhadap harta atau barang yang dipinjamnya atas dasar sukarela bukan karena memenuhi syarat pinjaman. Memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan termasuk akhlaq yang mulia dan terpuji, karena berarti menolong melepaskan kesusahan orang lain. Islam mengajarkan prinsip tolong menolong dalam kebaikan.⁵² Dalam Islam, hubungan pinjam meminjam tidak dilarang, bahkan dianjurkan agar terjadi hubungan saling menguntungkan yang pada gilirannya berakibat pada hubungan persaudaraan. Hal yang perlu diperhatikan adalah apabila hubungan itu tidak mengikuti aturan yang dianjurkan oleh islam. Karena itu, pihak-

⁵¹ *Ibid*

⁵² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001, h. 214.

pihak yang berhubungan harus mengikuti etika yang digariskan oleh Islam.⁵³



⁵³Veithzal Rivai, *Op.Cit*, h.788

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur, Ruslan. 2013. *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Anshori. Ghofur. Abdul. 2010. *Perjanjian Islam Dalam Indonesia, Konsep Gegulasi, dan Implementasi*. Yogyakarta, ed.1 cet. 2.
- Antonio. Syafi'i. Muhammad. 2001. *Bank Syariah*. Bandung, Pustaka Setia.
- Anwar. M. Oos. 2014. *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. Cetakan Kedua. Bandung, Alfabeta.
- Anwar, 2007. *Manajemen Pemberdayaan Perempuan*. Bandung, Alfabeta.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian*. Jakarta, Rineka Cipta. Edisi Revisi V.
- Aziz, Abdul. 2008. *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*. Yogyakarta, Graha Ilmu.
- BN. Marbun, 2003. *Kamus Manajemen*. Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.
- BPS Kabupaten Lampung Selatan, 2015. *Statistik Daerah Kecamatan Natar*.
- Cambel. 1989. *Riset dalam Efektivitas Organisasi*, Terjemahan Salut Simamora. Jakarta, Erlangga.
- Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia. 2007. *Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan*. Jakarta.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.
- Gunawan, Sumodiningrat. 1999. *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial*. Jakarta, Gramedia.
- H. Basri, Faisal. 2002. *Perekonomian Indonesia Tantangan dan Harapan Bagi Kebangkitan Ekonomi Indonesia*. Jakarta, Erlangga.
- Hadi, Sutrisno. 2004. *Metodelogi Research*. Yogyakarta, ANDI.
- Hakim, Lukman. 2012. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Jakarta, Penerbit Erlangga.
- Hasan, Iqbal. 2002. *Pokok-Pokok Materi Metodelogi dan Aplikasinya*. Bogor, Ghalia Indonesia.

- _____. 2008. *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Hasan. Soewarman. Engking. 2002. *Strategi Menciptakan Manusia Yang Bersumber Daya Unggul*. Bandung, Pustaka Rosda Karya.
- Hasbi ash Shieddieqy. Muhammad. Teuku. 2001. *Hukum-hukum Fiqh Islam*. Semarang, Pustaka Rizki Putra.
- Huda, Nurul, dkk. 2015. *Ekonomi Pembangunan Islam*. Jakarta, Prenadamedia Group.
- Hurairah. Abu. 2008. *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat Model dan Strategi Pembangunan yang Berbasis Kerakyatan*. Bandung, Humaniora.
- Ismail. Usman. Asep. *Pengalaman Al-Qur'an Tentang Pemberdayaan Dhua'fa*. Jakarta, Dakwah Press. Cet. Ke-1.
- Karim, Helmi, 2002. *Fiqh Muamalah*. Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Kartsasmita, Ginandjar. 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat*. Jakarta, Pustaka Cidesindo.
- Kasmir. 2010. *Kewirausahaan*. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. 2013. *Kewirausahaan*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada. Edisi Revisi cet. 8.
- Kuncoro, Mudrajad. 2003. *Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi*. Jakarta, Penerbit Erlangga.
- Kurniawan. Agung. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta, Pembaruan.
- Lubis, Martani. 1987. *Manajemen Modern*. Jakarta, Rineka Cipta.
- Lukman Sutrisno, 1995. *Menuju Masyarakat Partisipatif*. Yogyakarta, Kanisius.
- M. Anton, Moeliono. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. 1. Jakarta, Balai Pustaka.
- Mahmudi. 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta, Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Mahyu Danil, *Pengaruh Pendapatan Terhadap Tingkat Konsumsi pada Pegawai Negeri Sipil di Kantor Bupati Kabupaten Bireuen*. Journal Ekonomika Universitas Almuslim Bireuen Aceh, Vol. IV No.7:9

- Mubyanto. 2000. *Membangun Sistem Ekonomi*. Yogyakarta, BPFE.
- Muflich. Ayip. 2006. *Masalah dan Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat dalam Mendukung Ketahanan Pangan*. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (DEPDAGRI).
- Mujahidin, Akhmad, 2007. *Ekonomi Islam*. Jakarta, Rajagrafindo Persada.
- Muslich. Wardi. Ahmad. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta, Amzah.
- Palimbunga, Melda. *Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Di Kelurahan Maridan Kec. Sepaku Kab. Penajam Paser Utara*. Volume 1, Nomor 1, 2013. (eJournal Ilmu Pemerintahan), 21-08-2017
- Pedoman Umum PNPM Mandiri, 2007.
- Pedoman Pelaksanaan Strategi Komunikasi PNPM Mandiri. 2008.
- Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan. 2014.
- Poerwadarminto, 2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta, Balai Pustaka.
- Pujoalwanto, Basuki. 2014. *Perekonomian Indonesia*. Yogyakarta, Graha Ilmu.
- Reksoprayitno. 2004. *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*. Jakarta, Bina Grafika.
- Rianto. Nur. Muhammad. 2012. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung, CV Pustaka Setia.
- Rivai. Veithzal, Arifin. Arfian. 2010. *Islamic Banking*. Jakarta, PT. Bumi Aksara.
- Rukmana. Machmud. Amir. 2010. *Bank Syariah, Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*. Jakarta. ed. 1 cet. 1.
- Sabiq. Sayyid. 2009. *Fiqh Sunnah 4*. Jakarta, Cempaka Putih Tengah.
- Siagian. P. Sondang. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Soetomo, 2006. *Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Subagyo, P. Joko. 2011. *Metode Penelitian Dalam Teori & Praktik*. Jakarta, Rineka Cipta.

- Sudarsono. Heri. 2007. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta, Ekonosia, cet. 4.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung, Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung, PT. Refika Aditama.
- . 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerja Sosial*. Bandung, Ptevika Aditam. Cet Ke-1
- Sumiyati, Intan. *Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung*. Volume 1, Nomor 1, 2013. (eJournal Pemerintahan Integratif), 05-10-2017
- Supriatna. Tjahya. 2000. *Strategi Pembangunan dan Kemiskinan*. Jakarta, Rineta Cipta.
- Supriyono. 2000. *Sistem Pengendalian Manajemen*. Semarang, Universitas Diponegoro.
- Syarfi'i. Ahmad. Agus. *Manajemen Masyarakat Islam*. Bandung, Gerbang Masyarakat Baru.
- Widodo, Hartono. 2000. *PAS (Pedoman Akuntansi Syari'ah), (Panduan Praktis Operasional BMT)*. Bandung: Mizan.
- Yasin. Sulkan, Sunarto Hapsoyo. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Praktis, Populer dan Kosa Kata Baru*. Surabaya, Mekar.